

Pengaruh Atribut Nasional terhadap Kebijakan Cina Bersengketa dengan Jepang di Kepulauan Diaoyu/Senkaku

Christoforus Karang¹, Adam Abil², Maria Sharon³, Ananda Pratama⁴, Rafaela Gracia⁵

¹Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, karangwicaksono@gmail.com

²Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, adamabil@rocketmail.com

³Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, sharon.maria46@gmail.com

⁴Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, nandamanafe@outlook.com

⁵Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, gracejnrafaela@gmail.com

ABSTRACT

The dispute between China and Japan over administrative control of Diaoyu/Senkaku Islands raises a question about the intention of China with its confrontative foreign policy. China's foreign policy is often difficult to understand clearly largely because of its ambiguity in determining the appropriate instruments to fight for its interests. China's foreign policy in regards to its dispute with Japan over Diaoyu/Senkaku Islands should not have been implemented because of China's membership and ratification of UNCLOS back in 1996. By using the qualitative method along with the National Attribute theory by Valerie Hudson, it was found that China's confrontative foreign policy was based of the fact that China has an advantage on the aspects of its national attribute, mainly on its natural resources, economic and military capabilities.

Keywords: Diaoyu; Senkaku; Cina; Jepang; Atribut Nasional

ABSTRAK

Konflik sengketa antara Cina dengan Jepang atas kontrol administratif di Kepulauan Diaoyu/Senkaku menimbulkan pertanyaan mengenai intensi Cina dengan kebijakannya yang konfrontatif. Kebijakan luar negeri Cina kerap kali sulit dipahami dengan baik, karena terjadi ambiguitas dalam menentukan instrumen-instrumen yang tepat dalam memperjuangkan keinginannya. Kebijakan Cina pada konflik sengketanya dengan Jepang atas Kepulauan Diaoyu/Senkaku seharusnya tidak dilakukan mengingat Cina telah tergabung dan meratifikasi UNCLOS pada tahun 1996. Menggunakan metode kualitatif serta melalui instrumen teori Atribut Nasional oleh Valerie Hudson, ditemukan bahwa kebijakan konfrontatif Cina didasari oleh adanya keuntungan dari aspek atribut nasional yang dimiliki oleh Cina, utamanya pada aspek sumber daya alam, kapabilitas ekonomi, dan kapabilitas militernya.

Kata Kunci: Diaoyu; Senkaku; Cina; Jepang; Atribut Nasional

Pendahuluan

Cina merupakan salah satu dari 119 negara yang menandatangani United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1996. Hal ini terlihat dari upaya Cina agar undang-undang (UU) yang dimilikinya sejalan dengan UNCLOS, salah satunya dalam *Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf* tahun 1998.¹ UU tersebut ditujukan untuk

¹ Xinmin Ma, "China and the UNCLOS: Practices and Policies," *The Chinese Journal of Global Governance* 5 (2019): 4. doi:10.1163/23525207-12340036.

memastikan Cina dapat mempraktikkan hak dan yurisdiksinya terhadap zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinentalnya, serta menjaga hak dan kepentingan maritim nasionalnya.² UU tersebut juga mencakup beberapa hal, seperti pulau buatan, yang mana, UU ini juga disesuaikan dengan UNCLOS.

Namun, dalam UU *Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* tahun 1992, Cina juga menyatakan bahwa laut teritorialnya merujuk pada perairan yang berbatasan dengan wilayah teritorialnya. Tidak hanya itu, Cina juga mengklaim kepemilikan beberapa area, salah satunya adalah Kepulauan Senkaku/Diaoyu.³ Sebelumnya, pada 4 September 1958, Cina memang telah mengklaim adanya garis dasar lurus (*straight baselines*) pada Deklarasi Laut Teritorial, bahwa “garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan pangkal-pangkal pesisir daratan (*mainland*) dan pesisir terluar daratan pulau-pulau”.⁴ Hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat internasional karena kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sendiri memang telah menjadi kontroversi di antara Cina dan Jepang.

Kebijakan konfrontasi antara Cina dan Jepang di Kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki tujuan bagi Cina untuk menguasai Kepulauan tersebut. Cina mendasarkan kebijakannya di abad ke-15 melalui dokumen ilmiah etnis Han Cina. Dalam dokumen dituliskan bahwa mereka sedang melakukan perjalanan menuju Kerajaan Ryukyu, yang pada waktu itu di bawah kontrol kekuasaan Dinasti Ming. Dokumen tersebut merupakan sebuah dokumen navigasi Cina, yang berjudul *Shun Feng Xiang Song* yang dituliskan sekitar tahun 1403.⁵ Berdasarkan keterangan tersebut, Cina mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kekuasaannya dan klaim tersebut merupakan sesuatu yang sah bagi Cina. Namun demikian, berbeda dengan Cina, Jepang mengklaim bahwa klaim historisnya adalah tepat. Pada tahun 1885, Jepang melakukan klaim bahwa telah menemukan Kepulauan Senkaku yang pada waktu tidak berpenghuni. Klaim “tanpa penghuni” ini menjadi dasar berdirinya Jepang di atas bukti hukum *terra nullius*, bahwa apabila ada pihak yang tanpa penghuni, maka akan terbuka untuk diakuisisi menjadi wilayah negaranya.⁶ Singkatnya, setiap negara mengklaim berdasarkan dengan yang telah diperjuangkan masing-masing.

Lebih jauh lagi, kebijakan Cina melakukan konfrontasi dilandasi eksplorasi penemuan UNCAFE (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East) yang menyatakan bahwa Laut Cina Timur, terkhusus di sekitar Kepulauan Senkaku, terdapat kandungan sumber daya alam yang besar. Sumber daya alam itu adalah kandungan minyak dan gas alam, sehingga menarik perhatian khusus bagi dunia, terkhusus bagi Cina dan Jepang.⁷ Dengan demikian, berdasarkan dengan apa yang telah kami paparkan di latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka kami mengusulkan pertanyaan penelitian, mengapa Cina melakukan kebijakan konfrontasi dengan Jepang di Kepulauan Senkaku/Diaoyu meski telah melakukan ratifikasi UNCLOS?

² “Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf of the People’s Republic of China,” ILO, diakses pada 5 Desember 2022, <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92660/108053/F-2106185583/CHN92660%20Eng.pdf>, 1.

³ “Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992,” UN, diakses pada 5 Desember 2022, https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_Law.pdf, 1.

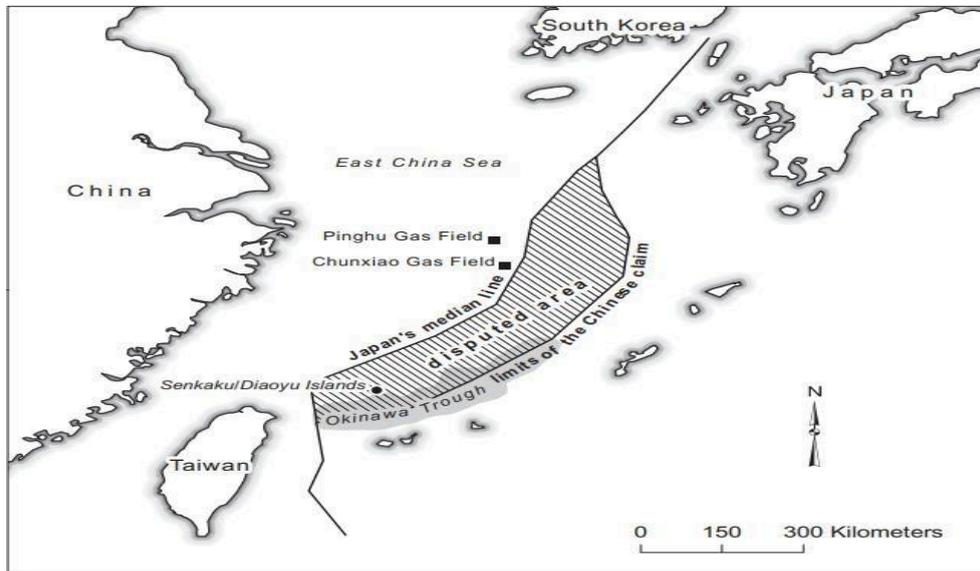
⁴ Robert W. Smith, “Straight Baselines Claim: China”, *Limit in the Seas* 117 (9 Juli 1996): 2.

⁵ Hui-Yi Katherine Tseng, *Lessons from the Disturbed Waters: the Diaoyu/Diaoyutai/Senkaku Islands Disputes* (Singapore: World Scientific Publishing, 2015), 31-32.

⁶ Anugerah H. Rahmanto, “Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013),” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3, 1 (2014): 71.

⁷ Kadek T. S. Adnyana, Dewa G. S. Mangku, dan Ratna A. Windari, “Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Yustisia* 1, no. 1 (2018): 103, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28669>.

Gambar 1. Area konflik Kepulauan Senkaku/Diaoyu



Source: Manicom, 2014

Teori

Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori Atribut Nasional dari Valerie Hudson sebagai kerangka teoritis dalam menganalisis faktor pendorong Cina dalam menguasai Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Dalam suatu negara, terdapat beberapa unsur yang menjadi kekuatan negara tersebut. Unsur tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Setiap unsur tersebut dapat dikatakan sebagai atribut nasional. Atribut nasional menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dikarenakan adanya unsur penting yang dimiliki oleh suatu negara dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut.⁸ Atribut nasional juga bersifat relatif bagi setiap negara. Bagaimanapun juga, setiap negara memiliki atribut nasional yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain.

Jika kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh atribut nasional yang dimiliki negara tersebut dianggap sangat baik, maka negara tersebut akan melihat hal tersebut sebagai keuntungan. Namun, jika negara lain melihat hal tersebut, maka dia dapat beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan ataupun merugikan. Terdapat instrumen-instrumen dalam atribut nasional yang dianggap penting dalam mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri yaitu sumber daya alam, kapabilitas militer, dan kapabilitas ekonomi.

Sumber daya alam menjadi hal yang dimiliki oleh suatu negara tertentu. Sumber daya alam dalam setiap negara berbeda-beda, tergantung dengan kondisi geografis negara tersebut. Kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terdapat dalam setiap negara. Minyak dan mineral merupakan salah satu hal yang diincar oleh negara-negara besar dan menjadi intensi bagi negara-negara untuk memilikinya. Setiap negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah akan merasa tidak diuntungkan oleh negara-negara besar yang menginginkannya.

⁸ Valerie M. Hudson dan Benjamin S Day, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* (Maryland: Rowman & Littlefield, 2019), 161.

Kapabilitas militer yang dimiliki suatu negara merupakan hal yang menjadi sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Superioritas mengarah pada kebijakan yang bersifat koersif. Kebijakan tersebut menjadi tekanan bagi suatu negara dan hal ini bersifat agresif. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa negara mengandalkan kebijakan yang bersifat koersif tersebut untuk mencapai tujuan negara tersebut. Dengan adanya kemampuan militer yang dominan, negara tersebut dapat melakukan segalanya agar mencapai tujuan. Kemampuan militer juga berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri.

Kemudian, Kapabilitas ekonomi kekayaan suatu negara juga mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Kemampuan ekonomi menciptakan sebuah ketergantungan dalam kebijakan luar negeri. Negara yang memiliki kekayaan ekonomi yang berlimpah akan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan menjadi salah satu faktor penentu dalam suatu kebijakan. Namun, ketergantungan tersebut dapat terlihat hanya pada negara berkembang tertentu.

Melalui teori atribut nasional serta komponen-komponennya, penulis berharap dapat menjelaskan kepentingan Cina melalui kebijakan luar negerinya yang cenderung konfrontatif dengan Jepang pada konflik sengketanya di Kepulauan Diaoyu/Senkaku. Menurut teori atribut nasional, adanya kelebihan (*advantage*) pada salah satu ataupun beberapa komponen atribut nasional seperti kapabilitas militer, sumber daya alam, maupun kapabilitas ekonomi dapat dianggap menjadi keuntungan yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Analisis

a. Faktor Pendorong Sumber Daya Alam

Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1969, yang mana, ditemukan cadangan minyak dan gas di dunia yang besar di Kepulauan Diaoyu/Senkaku, dan ada kemungkinan lebih besar daripada yang telah ditemukan di Teluk Persia. Penemuan ini dilakukan oleh UNCAFE.⁹ Penemuan ini pun membuat Cina dan Jepang saling memberikan klaim yang membuat pembenaran agar kepulauan tersebut menjadi milik diri mereka sendiri.

Pada wilayah tersebut, memang terhubung antara Cekungan Laut Cina Timur dengan Cekungan Tsushima (dekat Selat Korea), dengan ketebalan sedimentasi mencapai 1000 meter. Tepat setelah Cekungan tersebut, terdapat struktur paparan Peikang (Taiwan) dan Kepulauan Penghu (distrik Pescadores Cina), memiliki struktur batuan yang berbeda struktur batuan pada umumnya (fasies) yang bernama Neogen. Di sisi lain, karena adanya perubahan struktur geologi, sedimen tersebut bergerak dan membentuk cekungan di Laut Kuning yang terjadi sejak zaman Pleistosen. Sedimentasi yang telah berusia 1,5 juta tahun dan ditambah adanya struktur fasies tersebut, maka mengisi formasi fasies ketiga, yang tidak dapat bertumpu secara selaras di “perut bumi” sehingga menghasilkan akumulasi hidrokarbon yang banyak di sekitarnya.¹⁰ Dengan demikian, berdasarkan struktur geologi yang terbentuk, maka tidak mengherankan bahwa di sekitar Laut Cina Timur terdapat banyak cadangan energi, terlebih di sekitar Kepulauan Diaoyu/Senkaku.

Cina mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Economic Commission for Asia and the Far East Committee dan memberikan perhatian bahwa melalui Kilang Minyak Chunxiao sudah dikembangkan oleh CNOOC (China National Offshore Oil Company) untuk melakukan operasional

⁹ Junwu Pan, *Toward a New Framework for Peaceful Settlement of China's Territorial and Boundary Dispute* (Boston: Martinus Nijhoff, 2009), 140.

¹⁰ “Economic Commission for Asia and the Far East Committee for Co-Ordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas,” *Technical Bulletin* vol 3 (1970): 95-97, <https://digitallibrary.un.org/record/146495?ln=en>.

sejak 2001 yang berada dekat dengan Kepulauan Senkaku/Diaoyu tersebut.¹¹ CNOOC menemukan bahwa klaim pengembangan (yang bisa dijangkau, belum termasuk yang belum bisa dijangkau) cadangan seluruh sumber energi di sana mencapai total 363,9 miliar kubik kaki. Bila dikonversikan dalam bentuk barel, maka persediaan sumber energi yang ada di sana adalah sebesar 648105900000.¹² Dari total tersebut, terdapat sekiranya masih ada cadangan gas alam sekitar 17,5 triliun kubik kaki. Selain itu, terdapat juga cadangan minyak yang masih dalam tahap pencarian (belum terbukti dalam eksplorasinya) sekitar 160 miliar barrel.¹³ Alhasil, dapat dilihat bahwa di sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga membuat Cina sangat ingin menguasai wilayah tersebut menjadi kedaulatannya.

Bila wilayah tersebut berhasil dikuasai, maka Cina memiliki pasokan energi yang aman, sehingga tidak perlu mencari kekurangan dari impor Timur Tengah, terkhusus gas dan minyak. Disebutkan bahwa kebutuhan energi (berdasarkan konsumsi dan permintaannya) yang dikonsumsi Cina terlihat dalam tabel berikut ini:¹⁴

Tabel 1. Proyeksi Konsumsi dan Permintaan Energi Utama Cina, 2010-2035

Proyeksi Konsumsi dan Permintaan						
Sumber energi	Konsumsi 2010	Konsumsi 2020	Konsumsi 2035	Permintaan 2010	Permintaan 2035	Permintaan 2010-2035 *
Batu bara	514	564	478	1,602	1,968	80.80%
Minyak	357	554	677	448	752	2.20%
Gas	57	161	269	91.4	451.8	6.60%
Listrik	300	544	736	315.4	357.5	3.60%
Panas Bumi	64	80	74	Tidak ada data	Tidak ada data	N/A
Terbarukan	213	198	158	284	483	2.10%
Total	1,506	2.099	2,402	2,416	3,872	1.90%

Source: Manicom, 2014

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa intensitas permintaan dan konsumsi diproyeksikan naik setiap tahunnya, terutama pada minyak dan gas. Pada tahun 2010, konsumsi minyak mencapai 357 miliar ton, sedangkan permintaannya mencapai 448 miliar ton. Lebih lanjut, pada tahun 2035 nanti, permintaan gas mencapai 451,8 miliar ton dengan konsumsi gas sebesar 269 miliar ton.

¹¹ James Manicom, *Bridging Troubled Waters: China, Japan, and Maritime Order in the East China Sea* (Washington DC: Georgetown University Press, 2014), 122.

¹² Ibid., 123.

¹³ Ibid., 124.

¹⁴ Ibid., 125.

Berdasarkan data-data tersebut, terbukti bahwa melalui indikator sumber daya alam, Cina ingin menguasai wilayah tersebut dengan tujuan untuk mengamankan terlebih dahulu pasokan energi yang ada di dalam negerinya.

Selain energi yang terkandung, Laut Cina Timur di sekitar Kepulauan Diaoyu/Senkaku, menyimpan kekayaan berupa perikanan yang banyak. Potensi perikanan menyumbang setidaknya 25,3 juta ton sepanjang tahun 1980-an sampai 1990-an.¹⁵ Sektor perikanan merupakan sektor primadona bagi Cina, karena hal tersebut telah diwariskan secara turun-temurun, bahkan sejak zaman mereka telah menjadi nelayan tradisional.¹⁶ Dengan melihat potensi perikanan tersebut, maka Cina semakin bersemangat dalam mengklaim Kepulauan Diaoyu/Senkaku tersebut. Tujuan klaim tersebut adalah meningkatkan sektor primadona dalam sektor perikanan. Hal ini terbukti melalui tabel berikut ini, bahwa:¹⁷

Tabel 2. Cina: Produksi Makanan laut, 2017-2021

Kategori/Tahun	2017	2018	2019	2020	2021*
Total Produksi Seafood	64.45	64.58	64.80	65.49	66.0
-Total Produksi Budidaya	49.06	49.91	50.79	52.24	52.9
---Laut	20.01	20.31	20.65	21.35	
---Air tawar	29.05	29.60	30.14	30.89	
-Total Produksi Tangkapan	15.39	14.26	14.01	13.25	13.1
---Laut	13.21	12.70	12.2	11.79	
---Air tawar	2.18	1.96	1.84	1.46	

Sumber: 2021 Statistik Abstrak China; *Data untuk tahun 2021 adalah perkiraan FAS/Beijing.

Source: China's Fishery Report, 2021

¹⁵ Ibid., 68.

¹⁶ Tah, LSL., et. al., "Status, Trends, and the Future of Fisheries in the East and South China Seas," *Fisheries Centre Research Reports* 27, no. 1 (2019): 20, https://www.researchgate.net/publication/334331326_Status_Trends_and_the_Future_of_Fisheries_in_the_East_and_South_China_Seas.

¹⁷ "2021 China's Fishery Report," *United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service*, diakses pada 26 November 2022, https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=2021%20China%27s%20Fishery%20Report_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_12-17-2021.

Dalam produksi makanan laut, Cina mengalami peningkatan yang cukup banyak. Pada tahun 2019, terdapat sekiranya 64,80 juta metrik ton; angka tersebut meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 65,49 juta metrik ton. Perikanan sangat penting bagi Cina untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, sektor energi dan perikanan yang menjadi sumber daya alam sangat menarik minat Cina dalam mempengaruhi kebijakan konfrontasi dengan Jepang di Kepulauan Diaoyu/Senkaku.

b. Faktor Pendorong Kapabilitas Militer

Tahun 2008 merupakan tahun kapal-kapal milik penjaga pantai Republik Rakyat Cina mulai mengarungi dan melaksanakan aktivitas maritim mereka di perairan Kepulauan Diaoyu/Senkaku yang sedang menjadi objek sengketa Cina dengan Jepang, dengan adanya peningkatan aktivitas maritim yang meningkat secara signifikan pada tahun 2012.¹⁸ Adanya peningkatan aktivitas di perairan kepulauan sengketa tersebut disebabkan oleh “pembelian” 3 dari 8 pulau di dalam kepulauan tersebut oleh pemerintahan Jepang pada tahun yang sama.¹⁹ Terlepas dari perdebatan mengenai insiden mana yang membuat Cina melakukan eskalasi aktivitas maritim di perairan Kepulauan Diaoyu/Senkaku, tindakan yang berani tersebut biasanya ditandai dengan adanya kepentingan yang disokong dengan kapabilitas yang memadai.

Kapabilitas yang dimaksud adalah mengenai kapabilitas angkatan bersenjata dari Cina, yang dalam permasalahan sengketa di Kepulauan Diaoyu/Senkaku seringkali digunakan “angkatan bersenjata” untuk menekan teritorial di perairan sekitar kepulauan tersebut. Menurut Hudson, tindakan ini seringkali disebut sebagai “diplomasi koersif”, sebuah kebijakan luar negeri yang memungkinkan jika sebuah negara memiliki keunggulan dalam senjata ataupun dalam kapabilitas militernya, yang digunakan secara agresif untuk mengejar kepentingannya.²⁰ Hal ini yang secara efektif digunakan Cina terhadap Kepulauan Diaoyu/Senkaku untuk mendapatkan kepentingannya.

Kapabilitas militer didefinisikan pada umumnya sebagai produk hasil dari sumber daya yang dimiliki suatu negara, yang berakibat unsur dasar untuk menghitung kapabilitas militer suatu negara menjadi tergantung pada ukuran anggaran yang digunakan untuk militer serta pengeluarannya, ukuran angkatan bersenjata, dan juga ukuran GDP (*Gross Domestic Product*) negara tersebut.²¹

Anggaran militer Cina merupakan yang terbesar di dunia, dengan menempati peringkat terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan anggaran militer pada tahun 2022 sebesar 1,45 triliun Renminbi (229,6 miliar dolar AS).²² Anggaran tahun 2022 ini naik sebesar 7,1 persen dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya sebesar 213,3 miliar dolar AS, di mana adanya tren di persentase naiknya anggaran militer Cina setiap tahunnya.²³ Sedangkan anggaran militer Jepang hanya mencapai 6,17 triliun Yen (54,5 miliar dolar AS) untuk tahun fiskal 2022 yang diambil dari 1,11 persen dari GDP.²⁴ Jepang juga mengalami kenaikan alokasi anggaran militernya melalui

¹⁸Alessio Patalano, "A Gathering Storm? The Chinese 'Attrition Strategy for the Senkaku/Diaoyu Islands," *RUSI Newsbrief* 21 (2020): 21.

¹⁹ Ibid., 2.

²⁰ Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Classic Contemporary Theory* (Maryland: Rowman & Littlefield, 2014), 168-169.

²¹Michael Beckley, "Economic development and military effectiveness," *The Journal of Strategic Studies* 33, no. 1 (2010): 43-79.

²² "What Does China Really Spend on Its Military?," ChinaPower Project, June 29, 2022, <https://chinapower.csis.org/military-spending/>.

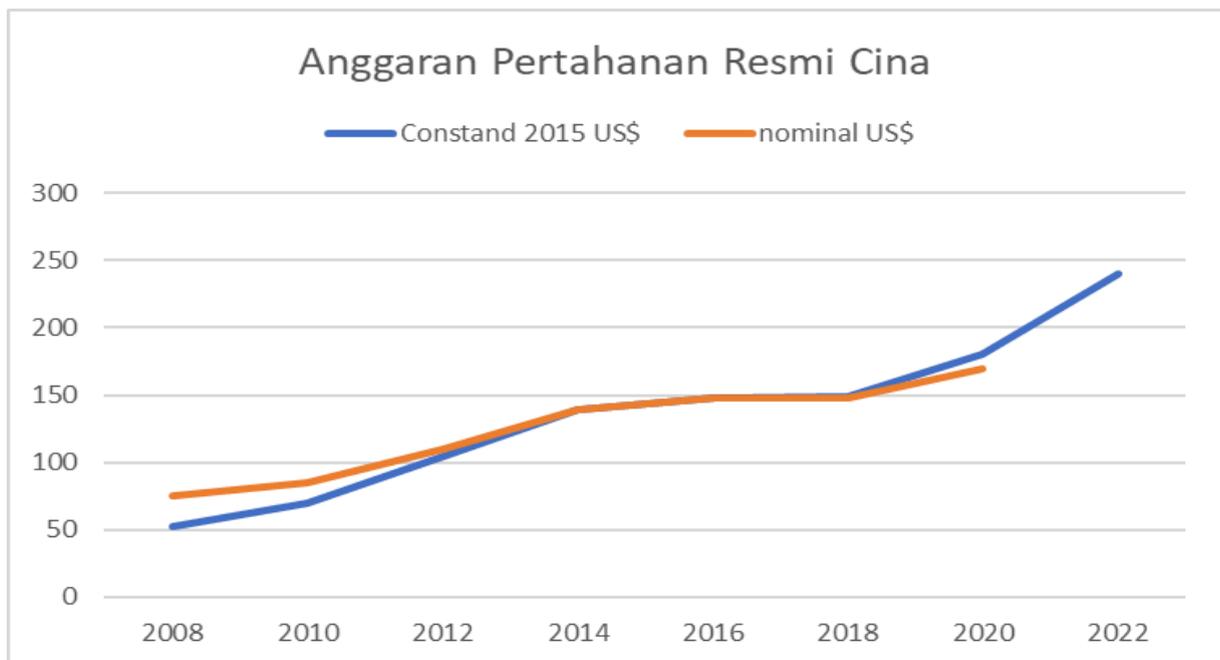
²³ Ibid.

²⁴ Fennela McGerty and Tom Waldwyn, "Japan's Defence Budget Break-Out," IISS, 2022, <https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2022/06/japans-defence-budget-break-out>.

Defense-Strengthening Acceleration Package, yang digunakan untuk menguatkan pengeluaran militer tahun fiskal 2021 dan 2022 sebesar 6,8 milyar dolar AS.²⁵

Kenaikan anggaran militer maupun kenaikan persentase anggaran militer tiap tahunnya mempunyai implikasi kepentingan yang terkait dengan keamanan, baik itu stabilitas keamanan ataupun mengejar kepentingan keamanannya. Dalam hal ini, kenaikan anggaran militer Cina pada tahun 2022 digunakan untuk mengejar kepentingan keamanannya, salah satunya seperti agresifnya diplomasi koersif terhadap sengketa dengan Jepang di Kepulauan Diaoyu/Senkaku. Sedangkan dalam pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanannya, Jepang mengatakan bahwa alasan naiknya alokasi anggaran militer mereka adalah adanya kemerosotan pada situasi keamanan Asia Timur, yang diasumsikan mengacu kepada Korea Utara dan agresivitas Cina.²⁶ Selain itu, modernisasi angkatan bersenjata juga bisa menjadi alasan naiknya anggaran militer di Cina. Alhasil, dalam konteks sengketa Diaoyu/Senkaku, naiknya anggaran militer Cina masuk akal dalam mencegah adanya intervensi asing dan menekan Jepang dalam masalah sengketa Kepulauan tersebut.

Tabel 3. Anggaran Pertahanan Resmi Cina, 2008-2022

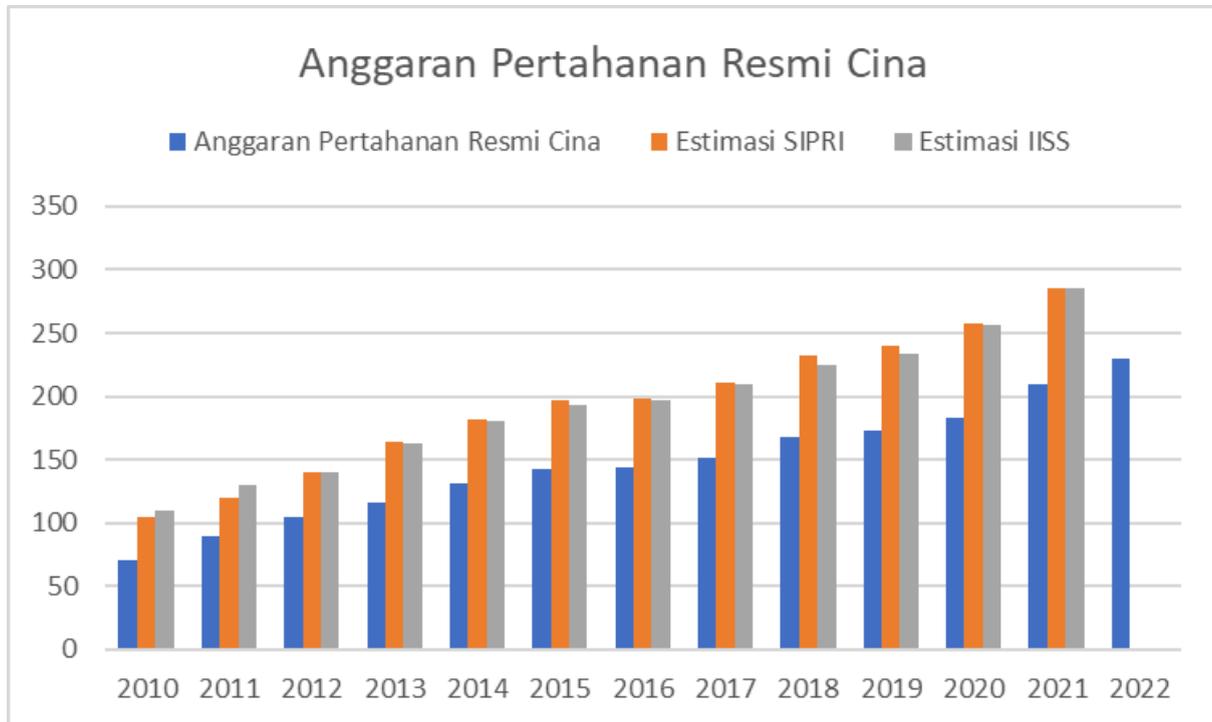


Source: IISS, 2022

Sedangkan untuk penggunaan anggaran militer Cina, yang sering diperdebatkan oleh para analis karena laporan pengeluaran militer Cina dinilai tidak transparan, misalnya menurut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) anggaran militer Cina tahun 2021 sebesar 209,2 miliar dolar AS dan menurut IISS (International Institute for Strategic Studies) estimasi anggaran yang digunakan untuk kepentingan militer bisa sebesar 270 sampai dengan 293,4 miliar dolar AS.²⁷ Adanya estimasi ini dipengaruhi oleh pernyataan Departemen Keamanan AS yang menyatakan pada 2021, pengeluaran Cina untuk kepentingan militernya diperkirakan sekitar 1,1 hingga 2 kali lebih besar daripada anggaran militernya.²⁸

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.

Tabel 4. Perkiraan Pengeluaran Pertahanan Cina, 2010-2022



Source: Chinese Central Government, SIPRI and IISS, 2022

Diambil dari laporan Kementerian Pertahanan AS, personel aktif militer angkatan bersenjata Cina atau PLA (*People's Liberation Army*) diestimasi sejumlah 3.132.000 personel di tahun 2022 yang dibagi dalam 6 matra, angkatan darat (*Ground Forces*), angkatan laut (*Navy*), angkatan udara (*Air Force*), angkatan roket (*Rocket Force*), dan angkatan bantuan strategis (*Strategic Support*), angkatan cadangan (*Reserve forces*), dan termasuk paramiliter serta *China Coast Guard* dan *Maritime Militia*.²⁹

Untuk persenjataan dan perlengkapan angkatan darat Cina, diperkirakan mereka mempunyai 5.250 kendaraan tempur, yang terbagi dalam kendaraan tempur lapis baja, artileri, kendaraan taktis, dan proyektor roket. Untuk angkatan udara, Cina mempunyai 3.285 pesawat tempur yang terbagi dalam *fighter/interceptor*, *dedicated attack aircraft*, *transport aircraft*, *trainer aircraft*, *special mission aircraft*, dan helikopter termasuk helikopter tempur. Terakhir, pada angkatan laut, *coast guard* dan milisi maritim Cina diperkirakan mempunyai 777 buah kapal tempur yang termasuk kapal induk, kapal induk pembawa helikopter, *destroyer*, *frigate*, *corvette*, kapal selam, kapal patroli, serta kapal khusus ranjau laut.³⁰

Selain persenjataan konvensional, Cina juga mempunyai pasokan persenjataan yang dianggap sebagai WMD (*Weapons of Mass Destruction*) dalam bentuk hulu ledak nuklir (*Nuclear Warhead*). Menurut data SIPRI *Yearbook 2022*, Cina saat ini diperkirakan mempunyai 350 hulu ledak nuklir, yang dapat diluncurkan melalui platform rudal balistik dengan cakupan jarak dan muatan yang berbeda-beda, mulai dari rudal jelajah (*cruise missile*) sampai dengan rudal balistik interkontinental

²⁹ "2022 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China," 2022 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China § (2022), 45-103.

³⁰ Ibid.

(*Intercontinental Ballistic Missile, ICBM*) dapat dipasang dengan hulu ledak nuklir.³¹ Selain itu, Cina masih mempunyai bom konvensional (*dumb bombs*) yang dijatuhkan dari pesawat *bomber* yang juga dapat diisi dengan muatan nuklir.³² Persenjataan berbasis nuklir dan WMD merupakan alat yang sangat efektif dalam tindakan koersif Cina sebagai *deterrence* yang sangat mengancam bagi Jepang dalam sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku maupun untuk negara lain yang mencoba untuk intervensi dalam sengketa tersebut.

Tabel 5. Senjata Nuklir di Dunia, 2022

Negara	Hulu ledak yang digunakan ^a	Hulu ledak yang tersimpan ^b	Total persediaan ^b	Total inventaris 2022 ^b	Total inventaris 2021 ^b
Amerika Serikat	1744	1964	3708	5428	5550
Rusia	1588	2889	4477	5977	6255
Inggris	120 ^e	60 ^f	180 ^f	225 ^f	225
Francis	280	10	290	290	290
Cina		350 ^g	350 ^g	350 ^g	350
India		160	160	160	156
Pakistan		165	165	165	165
Israel		90	90	90	90
Korea Utara	--	20 ^h	20 ^h	20 ^h	[40-50] ^h
Total	3732	5708	9440	12705	13080

Source: SIPRI, 2022

Menurut data *World Bank* tahun 2021 GDP Cina ada pada angka 15,8 triliun dolar AS dengan pertumbuhan GDP tahunan ada pada angka 8,1 persen.³³ Seperti yang dicantumkan sebelumnya, sering menjadi perdebatan ialah angka pengeluaran militer Cina yang tidak diketahui secara detail karena Cina tidak transparan dalam melaporkan pengeluarannya, yang menyebabkan perdebatan dan estimasi seperti yang dilakukan oleh SIPRI dan IISS. Namun, tren pengeluaran militer Cina dalam satu dekade ke belakang memperlihatkan bahwa pertumbuhan tahunan pengeluaran militer Cina telah mengalahkan pertumbuhan tahunan dari GDPnya, yang membuktikan bahwa

³¹ *SIPRI Yearbook 2022: Armaments, Disarmament and International Security* (New York: Oxford University Press, 2022), 364-367.

³² *Ibid.*, 366.

³³ "GDP (Current US\$) - China," Data, accessed December 5, 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN>.

adanya fokus pada kepentingan militer dan keamanan.³⁴ Melalui data-data yang telah dipaparkan, dapat diasumsikan bahwa secara kapabilitas militer, Cina dapat mengancam Jepang, sehingga Jepang harusnya menjadi lebih hati-hati terhadap Cina yang mempunyai *advantage* secara kapabilitas dan instrumen militer terhadap Jepang.

c. Faktor Pendorong Kapabilitas Ekonomi

Jepang dan Cina memiliki laju perkembangan ekonomi yang berbeda. Pada tahun 1981 sampai awal tahun 2008, Jepang memiliki perkembangan ekonomi lebih baik dibanding dengan Cina melalui kenaikan yang stabil.³⁵ Namun, terjadi peningkatan ekonomi Cina tahun 1996 sampai tahun 2008, yang GDPnya mengalami peningkatan hingga 104%, sedangkan Jepang sendiri mengalami fluktuasi dalam perekonomiannya.³⁶ Dalam peningkatan perekonomian, Jepang berhasil meningkatkan GDP per kapita hingga 254% dalam periode waktu 33 tahun (1981-2014), sedangkan Cina mempertahankan dan mengembangkan pasar ekonominya secara pesat, dibuktikan pada tahun 2014 berhasil mencapai selisih GDP per kapita hingga US\$ 7,590 dengan peningkatan 625% sejak tahun 2001.³⁷ Peningkatan tersebut terjadi pada periode waktu yang berbeda. Meski demikian, peningkatan yang terjadi pada perekonomian Cina lebih pesat, dilihat pada periode waktu yang lebih singkat, dan angka yang lebih signifikan.

Meskipun sebelumnya Jepang memiliki perekonomian yang lebih baik dari Cina, Cina berhasil meningkatkan perekonomiannya secara pesat, dan mempertahankan kekuatan ekonominya hingga kini. Cina memiliki GDP sebesar US\$17,73 triliun pada tahun 2021, dengan perkembangan sekitar 8, 10% per tahunnya.³⁸ Apabila dibandingkan dengan Jepang, yang memiliki GDP sebesar US\$ 4,9 triliun pada tahun 2021, tentu Cina menjadi raksasa ekonomi khususnya kawasan Asia Timur.³⁹

Selain perkembangan ekonomi yang pesat, perdagangan antara kedua negara tersebut juga menjadi indikator keberhasilan ekonomi Cina yang mendominasi.

Tabel 6. Impor Jepang dari Cina, 2012-2021



³⁴ Matthew P. Funaiole and Brian Hart, "Understanding China's 2021 Defense Budget," Understanding China's 2021 Defense Budget | Center for Strategic and International Studies, November 30, 2022, <https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>.

³⁵ Thomas Pouffin and Victoria Pistikou, "The Myth of the Positive Impact of Asymmetric Economic Interdependence on National Security. The Case of the Sino-Japanese Conflict", EBEEC Conference Proceedings, *The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World*, KnE Social Sciences, 142-159. DOI 10.18502/kss.v1i2.653

³⁶ Ibid.

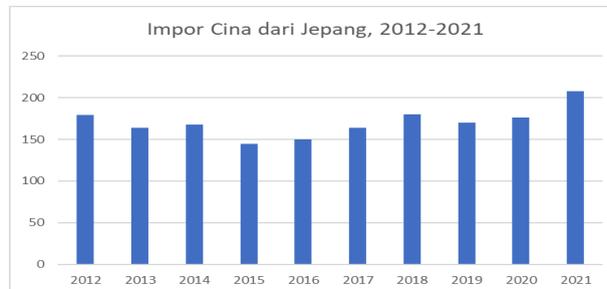
³⁷ Ibid.

³⁸ Trading Economics, "China GDP," diakses 6 Desember 2022, <https://tradingeconomics.com/china/gdp>.

³⁹ Trading Economics, "Japan GDP," diakses 6 Desember 2022, <https://tradingeconomics.com/japan/gdp>.

Source: Trading Economics, 2022⁴⁰

Tabel 7. Cina import dari Jepang, 2012-2021



Source: Trading Economics, 2022⁴¹

Dari tabel grafik di atas, tercatat bahwa impor produk Jepang dari Cina mencapai 190 miliar pada tahun 2012.⁴² Jumlah impor Jepang terhadap produk Cina, apabila dilihat dari perbandingan kedua tabel di atas, tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah impor Cina terhadap produk Jepang, yang hanya mencapai kurang lebih 179 miliar.⁴³ Terdapat penurunan impor dari Cina terhadap produk Jepang dari tahun 2011 hingga tahun 2013, karena adanya eskalasi konflik Kepulauan Diaoyu/Senkaku, yang berakibat pada boikot produk-produk Jepang oleh masyarakat Cina.

Konflik memanas kembali setelah tindakan Jepang yang menasionalisasi Kepulauan Senkaku, karena gubernur Tokyo ingin membeli kepulauan tersebut dan menjadikannya bagian dari Tokyo.⁴⁴ Tindakan ini dinilai akan memicu keributan, dan oleh karena itu pemerintah pusat Jepang memilih untuk menasionalisasi, dengan harapan mengembalikan status quo. Namun, respons Cina terhadap situasi ini justru mengeskalasi kembali sengketa kepulauan ini, dengan maraknya protes di berbagai wilayah di Cina, hingga pemboikotan produk-produk Jepang termasuk produk otomotif oleh masyarakat Cina⁴⁵.

Pemboikotan yang terjadi mempengaruhi laju ekonomi Jepang, yang diikuti dengan penurunan jumlah kerja sama bilateral, hingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang berpengaruh pada hubungan *Foreign Direct Investment* (FDI) antara Jepang dan Cina.⁴⁶ Selain pemboikotan, industri pariwisata Jepang juga mengalami penurunan khususnya dari Cina. Pariwisata Jepang dari Cina menurun secara drastis hingga 110.663 pengunjung pada tahun 2012 hingga 2013.⁴⁷ Penurunan ini menjadi hal yang sangat buruk sepanjang sejarah industri pariwisata Jepang, terlebih saat terjadinya pembatalan penerbangan maskapai All Nippon Airways (ANA) oleh 43.000 warga

⁴⁰Trading Economics, "Japan Imports from China," diakses 5 Desember 2022, <https://tradingeconomics.com/japan/imports/china>

⁴¹ Trading Economics, "China Imports from Japan," diakses pada 5 Desember 2022, <https://tradingeconomics.com/china/imports/japan>

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ South China Morning Post, *Timeline: the Diaoyu-Senkaku Islands dispute*, diakses pada 5 Desember 2022, https://www.scmp.com/news/china/article/1039204/timeline-diaoyu-senkaku-islands-dispute?module=perpetual_scroll_0&ptype=article&campaign=1039204

⁴⁵ Meredith Cuilik, "Effects of the Senkaku/Diaoyu Island Dispute on Sino-Japanese Economic Relations," (BA thesis, University of Mississippi): 2017, 31

⁴⁶ Ibid, 8.

⁴⁷ Atsushi Kodera, *Tourism emerges as new economic driver for Japan*, *Japan Times*, diakses pada 5 Desember 2022, <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/25/reference/tourism-emerges-new-economic-driver-japan/>

Republik Rakyat Cina dengan tujuan Jepang.⁴⁸ Pemboikotan ini menunjukkan bagaimana keseriusan Cina dalam mengambil tindakan terhadap Jepang, dan kapabilitas Cina dalam mempengaruhi ekonomi Jepang secara signifikan apabila Jepang dengan sengaja melakukan tindakan yang dinilai merugikan Cina terkait sengketa kepulauan ini.

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Jepang dan Cina, mereka memiliki proses masing-masing dalam menumbuhkan perekonomian menuju kesuksesan. Meskipun Jepang terlebih dahulu mencapai kejayaan, hingga kini Cina yang memiliki dominasi ekonomi, bahkan mencakup lebih dari dua kali lipat GDP Jepang. Hal tersebut menunjukkan kekuasaan yang dimiliki oleh Cina dalam perekonomian. Di luar perkembangan tersebut, kami juga melihat dalam grafik perdagangan, di mana Jepang memiliki kecenderungan untuk lebih bergantung kepada Cina dibanding sebaliknya.

Selain itu, pemboikotan produk-produk Jepang mulai dari produk otomotif, pembatalan penerbangan, hingga penurunan angka pariwisata dari Cina ke Jepang, membuktikan bagaimana masyarakat Cina mampu mengarahkan kekuatan mereka melalui protes-protes yang dilakukan untuk menekan Jepang. Dengan tekanan yang berlaku sebagai ancaman tersebut, muncul asumsi bahwa Jepang akan takut untuk bermacam-macam dan tidak mengambil tindakan 'seenaknya' seperti yang dilakukan pada tahun 2012 lalu. Dominasi ekonomi yang dimiliki oleh Cina mulai dari GDP hingga pengaruh yang dimiliki masyarakatnya dalam mendukung kepentingan nasional, menjadi kekuatan Cina dalam menegaskan kembali kekuasaannya terhadap Jepang khususnya pada sengketa kepulauan Diaoyu/ Senkaku ini.

Kesimpulan

Tujuan kebijakan Cina dalam berkonfrontasi dengan Jepang pada awalnya di Diaoyu/Senkaku ini, karena adanya pernyataan provokatif dari penemuan UNCAFE tentang aspek sumber daya yang terkandung di sana. Beragam upaya Cina lakukan, sehingga seakan Cina melupakan dirinya yang telah meratifikasi UNCLOS, yang seharusnya tunduk pada hukum internasional tersebut. Melalui analisis yang kami lakukan dan dengan menggunakan level analisis atribut nasional, dapat dilihat bahwa melalui instrumen sumber daya alam yang berupa cadangan gas alam, minyak, dan perikanan, menjadi pendorong utama bagi Cina ingin sekali menguasai itu. Oleh karenanya, dalam memperlancar usahanya, melalui data di atas kertas dengan instrumen kapabilitas militer, Cina diasumsikan dapat dengan mudah mengerahkan segala alat tempurnya sehingga dapat membuat Jepang lebih berhati-hati terhadap Cina, sehingga klaim atas kedaulatan Diaoyu/Senkaku dapat terlaksana. Hal ini juga didukung dari instrumen kapabilitas ekonomi, yang dapat terlihat bahwa Cina merupakan negara kuat secara ekonomi, sehingga dapat membuat serangkaian kekuatan yang menegaskan Cina dapat menguasai wilayah tersebut melalui serangkaian ancaman yang merugikan ekonomi Jepang. Maka dari itu, adanya keuntungan yang dimiliki oleh Cina dalam ketiga aspek atribut nasional tersebut dengan jelas mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina yg cenderung konfrontatif pada konflik sengketanya dengan Jepang atas Kepulauan Diaoyu/Senkaku. Dengan demikian, kebijakan konfrontasi Cina terhadap Jepang di Diaoyu/Senkaku ini dapat dimengerti setelah pembahasan dan analisis dari kebijakan luar negerinya demi kepentingan dan sesuai dengan atribut nasional yang dimiliki Cina.

Referensi

⁴⁸ James Reilly, "A Wave to Worry About? Public opinion, foreign policy and China's anti-Japan protests", *Journal of Contemporary China* 23, 86 (2014), <https://doi.org/10.1080/10670564.2013.832519>

- Adnyana, Kadek T. S., Dewa G. S. Mangku, dan Ratna A. Windari. "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Yustisia* 1, no. 1 (2018): 99-110, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28669>.
- BBC. "How Uninhabited Islands Soured China-Japan Ties." Diakses pada 25 November 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11341139>.
- Beckley, Michael. "Economic development and military effectiveness." *The Journal of Strategic Studies* 33, no. 1 (2010): 43-79.
- Cuilik, Meredith. "Effects of the Senkaku/Diaoyu Island Dispute on Sino-Japanese Economic Relations." BA thesis, University of Mississippi, 2017.
- "Economic Commission for Asia and the Far East Committee for Co-Ordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas." *Technical Bulletin vol 3* (1970): 95-97. <https://digitallibrary.un.org/record/146495?ln=en>.
- Fravel, M. Taylor. "China's Assertiveness in the Senkaku (Diaoyu) Islands Dispute." *MIT Political Science Department Research Paper no. 16-19* (2016): 1-19. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2788165.
- Funaiolo, Matthew P., and Brian Hart, "Understanding China's 2021 Defense Budget," Understanding China's 2021 Defense Budget | Center for Strategic and International Studies, November 30, 2022, <https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>.
- "GDP (Current US\$) - China," Data, accessed December 5, 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN>.
- Hudson, Valerie M, and Benjamin S Day. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Maryland: Rowman & Littlefield. 2019.
- Hinge, Alan, *Australian Defence Preparedness: Principles, Problems and Prospects : Introducing Repertoire of Missions (ROMINS) a Practical Path to Australian Defence Preparedness*, Australian Defence Studies Centre, Canberra, 2000.
- Kodera, Atsushi. "Tourism emerges as new economic driver for Japan." *Japan Times*. Diakses pada 5 Desember 2022, <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/25/reference/tourism-emerges-new-economic-driver-japan/>.
- Koo, Min Gyo. "The Senkaku/Diaoyu Dispute and Sino-Japanese Political-Economic Relations: Cold Politics and Hot Economics?". *The Pacific Review*, 22:2, 205-232. DOI: 10.1080/09512740902815342.
- "Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf of the People's Republic of China." ILO. Diakses pada 5 Desember 2022. <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92660/108053/F-2106185583/CHN92660%20Eng.pdf>.
- "Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992." UN. Diakses pada 5 Desember 2022. https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_Law.pdf.

Letter Dated 95/04/06 from the Permanent Representative of China to the United Nations Addressed to the Secretary-General (New York: UN, 1995).

Ma, Xinmin. "China and the UNCLOS: Practices and Policies." *The Chinese Journal of Global Governance* 5 (2019): 1-20. doi:10.1163/23525207-12340036.

Manicom, James. *Bridging Troubled Waters: China, Japan, and Maritime Order in the East China Sea*. Washington DC: Georgetown University Press, 2014.

McGerty, Fennela, and Tom Waldwyn. "Japan's Defence Budget Break-Out." IISS, 2022. <https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2022/06/japans-defence-budget-break-out>.

Office of the Secretary of Defense, 2022 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China § (2022).

Patalano, Alessio. "A Gathering Storm? The Chinese 'Attrition Strategy for the Senkaku/Diaoyu Islands." *RUSI Newsbrief* 21 (2020): 21.

Pan, Junwu. *Toward a New Framework for Peaceful Settlement of China's Territorial and Boundary Dispute*. Boston: Martinus Nijhoff, 2009. 140.

Rahmanto, Anugerah H. "Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013)." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2014): 67-83. <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI7190-a7064de4cffullabstract.pdf>.

Reilly, James. "A Wave to Worry About? Public opinion, foreign policy and China's anti-Japan protests", *Journal of Contemporary China* Vol.23 Issue 86, 2014, <https://doi.org/10.1080/10670564.2013.832519>.

Richardson, Neil R, and Charles W Kegley. "Trade Dependence and Foreign Policy Compliance." *A Longitudinal Analysis*, June 1980.

SIPRI Yearbook 2022: Armaments, Disarmament and International Security (New York: Oxford University Press, 2022), 364-367.

South China Morning Post, *Timeline: the Diaoyu-Senkaku Islands dispute*. Diakses pada 5 Desember 2022, https://www.scmp.com/news/china/article/1039204/timeline-diaoyu-senkaku-islands-dispute?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=1039204.

Tah, LSL., et. al.. "Status, Trends, and the Future of Fisheries in the East and South China Seas." *Fisheries Centre Research Reports* 27, no. 1 (2019): 2-101. https://www.researchgate.net/publication/334331326_Status_Trends_and_the_Future_of_Fisheries_in_the_East_and_South_China_Seas.

Thomas Poufinas and Victoria Pistikou, "The Myth of the Positive Impact of Asymmetric Economic Interdependence on National Security. The Case of Ohe Sino-Japanese Conflict", EBEEC Conference Proceedings, *The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World*, KnE Social Sciences, pages 142-159. DOI 10.18502/kss.v1i2.653.

"Trading Economics, *Japan Imports from China*." Trading Economics. Diakses pada 5 Desember 2022. <https://tradingeconomics.com/japan/imports/china>.

"Trading Economics, *China Imports from Japan*." Diakses pada 5 Desember 2022. <https://tradingeconomics.com/china/imports/japan>.

Tseng, Hui-Yi Katherine. *Lessons from the Disturbed Waters: the Diaoyu/Diaoyutai/Senkaku Islands Disputes*. Singapore: World Scientific Publishing, 2015. 31-32.

“2021 China’s Fishery Report.” *United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service*. diakses pada 26 November 2022.
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=2021%20China%27s%20Fishery%20Report_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_12-17-2021.

“What Does China Really Spend on Its Military?” ChinaPower Project, June 29, 2022.
<https://chinapower.csis.org/military-spending/>.